

**Efektivitas Penerapan Aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan
Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya**

***The Effectiveness of Implementing the E-ABK 2024 Application in Office
Administration Positions in the General and Personnel Subdivision of the
Tegalsari District, Surabaya City***

Haninatus Syahidah¹, Gading Gamaputra²

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: haninatus.21007@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya,
email: gadinggamaputra@unesa.ac.id

Abstrak

Aplikasi E-ABK 2024 merupakan sistem berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk mencatat uraian tugas, menetapkan target, serta mengunggah data pendukung secara sistematis. Aplikasi ini dirancang agar perangkat daerah dapat mengukur beban kerja masing-masing jabatan secara objektif dan efisien, serta sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengacu pada teori efektivitas Duncan yang meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan aplikasi E-ABK 2024 masih belum optimal. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah target yang ditetapkan dan data pendukung yang diunggah, masih terdapat kekeliruan dalam penggunaan format dokumen yang telah ditentukan, serta adanya pegawai yang masih mengerjakan tugas di luar uraian jabatannya. Saran dari penelitian ini adalah penjadwalan koordinasi pengumpulan data, forum penyamaan pemahaman antar seksi, pelatihan internal mengenai regulasi aplikasi, pemutakhiran panduan pengisian, simulasi teknis dalam sosialisasi, pendampingan secara berkelanjutan, serta evaluasi sarpras secara berkala.

Kata Kunci: Efektivitas, Aplikasi E-ABK 2024, Analisis Beban Kerja

Abstract

The E-ABK 2024 application is an electronic-based system developed by the Organisation Division of the Surabaya City Regional Secretariat to record job descriptions, set targets, and systematically upload supporting data. This application is designed to enable regional agencies to objectively and efficiently measure the workload of each position, as well as to serve as a basis for planning staffing requirements. This study aims to analyse the effectiveness of the implementation of the E-ABK 2024 application in the Office Administration Position in the General and Personnel Sub-Division of

Tegalsari District, Surabaya City. The research method used is qualitative with a descriptive approach, referring to Duncan's effectiveness theory, which includes indicators of goal achievement, integration, and adaptation. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation, using interview guidelines as instruments. Data analysis included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the effectiveness of the E-ABK 2024 application implementation is still not optimal. There is a mismatch between the set targets and the supporting data uploaded, errors in the use of the specified document format, and employees still performing tasks outside their job descriptions. Recommendations from this study include scheduling data collection coordination, forums to align understanding across sections, internal training on application regulations, updating the filling guidelines, technical simulations during socialisation, continuous mentoring, and regular evaluation of infrastructure.

Keywords: *Effectiveness, E-ABK 2024 Application, Workload Analysis*

Pendahuluan

Analisis Beban Kerja merupakan langkah yang saling terkait dengan analisis jabatan, di mana beban kerja setiap jabatan dievaluasi untuk memastikan distribusi kerja yang seimbang dan optimal di seluruh organisasi. Pelaksanaan analisis beban kerja pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di setiap instansi. Dengan adanya analisis ini, diharapkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat dijalankan dengan baik, berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara (Didik Haryanto, 2021, hal. 2). Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat memberikan suatu ukuran bagi pegawai atau unit organisasi dalam pembagian tugas serta pelaksanaan kegiatan, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, prestasi kerja, penataan formasi pegawai, serta perbaikan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya (Buchari, 2021, hal. 1).

Dalam pelaksanaan analisis beban kerja di Indonesia diatur dalam tiga pedoman dengan ketentuan yang berbeda, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008. Ketiga peraturan ini menjadi acuan dalam menyusun analisis beban kerja pada setiap organisasi. Namun terdapat perbedaan signifikan pada metode dan pendekatan dalam masing-masing pedoman, khususnya dalam perhitungan jam kerja efektif.

Perbedaan dalam ketiga regulasi tersebut terletak pada aspek dalam perhitungan jam kerja efektif per minggu, per hari, dan per tahun dihitung menggunakan *allowance* berbeda. Jam kerja efektif, yang dihitung dengan mengurangi jam kerja formal dengan *allowance* (waktu tidak bekerja), menjadi dasar penting dalam mengukur beban kerja dan efisiensi setiap unit kerja. Perbedaan *allowance* dalam peraturan-peraturan tersebut, yaitu Peraturan PANRB No 1 Tahun 2020 dan Peraturan BKN No 9 Tahun 2022 memiliki *allowance* 30%, Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 memiliki *allowance* 25%. Perbedaan perhitungan dari jam kerja efektif tersebut akan

menjadi alat pengukur dari beban kerja yang dihasilkan pada setiap unit kerja. Melalui penerapan pedoman ini, pemerintah dapat merancang struktur organisasi yang lebih efektif, memastikan setiap unit memiliki jumlah pegawai yang sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

Aplikasi E-ABK 2024 merupakan sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan pengukuran dan perhitungan beban kerja pada tiap jabatan atau unit kerja, serta menyajikan informasi terkait tingkat efektivitas dan efisiensi kerja perangkat daerah berdasarkan jumlah pekerjaan yang ditangani. Penyusunan E-ABK 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Namun, saat ini telah terbit Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah menjadi acuan terbaru dalam menentukan nama jabatan (Kemdikbud, 2024). Dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan ini, Bagian Organisasi melakukan pembaruan data dan nomenklatur jabatan pada aplikasi E-ABK 2024 dengan memastikan data beban kerja yang tercatat dalam aplikasi akurat dan relevan dengan struktur organisasi yang berlaku di masing-masing perangkat daerah.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Surabaya bertanggung jawab untuk memasukkan data terkait beban kerja dan jabatan di unit kerjanya masing-masing. Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun (2020) tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam analisis jabatan, setiap OPD harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, serta alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Melalui inovasi pengembangan sistem Analisis Beban Kerja berbasis elektronik, diharapkan mampu menyajikan gambaran nyata mengenai kebutuhan pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, sistem ini juga berperan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan jumlah formasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai secara tepat, serta membantu mengurangi ketimpangan distribusi pegawai maupun penumpukan pegawai di beberapa perangkat daerah.

Pada pelaksanaan dalam pengisian E-ABK 2024, Bagian Organisasi memberikan pembekalan melalui zoom meeting pada masing-masing perangkat daerah terkait penggunaan aplikasi. Namun, dalam proses pelaksanaan di lapangan masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan sehingga perlu ditinjau lebih dalam, khususnya pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

1. Masalah pertama terdapat pada target. Target merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan di awal untuk setiap jabatan. Target ini biasanya harus didukung oleh bukti berupa dokumen atau kegiatan yang tercatat, serta disesuaikan dengan norma waktu pelaksanaannya. Berikut tampilan permasalahan pada target.

Gambar 1.2 Formulir isi pada Web E-ABK 2024

Kecamatan Tegalsari								
<i>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>								
No	Nama Staf	Tugas dan Fungsi	Uraian Tugas Staf	Hasil Kerja Staf	Target	Frekuensi	Volume	Data Pendukung
1	Pengadministrasi Perkantoran	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Melaksanakan entry data Aplikasi Barang dan Kartu Stok	Data Aset	24	Tahunan (1)	24	

Sumber : Data diolah Peneliti, 2024

Pada kolom "Target" terdapat jumlah target sebanyak 24. Hal ini berarti jabatan terkait, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan nama staf Pengadministrasi Perkantoran, harus mencantumkan dan melaksanakan 24 kegiatan berdasarkan uraian tugas staf yaitu "Melaksanakan entry data Aplikasi Barang dan Kartu Stok" serta dilengkapi bukti data pendukung.

Gambar 1.3 Data Pendukung pada Web E-ABK 2024

melaksanakan entry data Aplikasi Barang dan Kartu Stok

Sumber : Data Pendukung pada Web E-ABK 2024

Setelah melakukan pengecekan pada data pendukung, dapat dilihat pada gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa data pendukung yang di unggah hanya 1 kegiatan yang dilakukan dalam frekuensi Tahunan (1), artinya melaksanakan entry data aplikasi barang dan kartu stok dalam 1 Tahun hanya dilakukan 1 kegiatan saja. Seharusnya data pendukung dicantumkan sebanyak 24 kegiatan yang sesuai dengan target yang telah dicantumkan.

2. Masalah kedua, kurangnya pemahaman pegawai terkait aplikasi tersebut. Informasi ini dibuktikan dengan hasil observasi peneliti dalam pengisian E-ABK 2024 di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

“Pada awal pengisian masih ditemukan banyak permasalahan terkait unggah dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Bagian Organisasi. Namun seiring berjalannya waktu pada proses pengisian sampai tahap verifikasi akan tetapi masih terdapat pengisian yang belum mengalami perkembangan”. (Hasil Observasi Peneliti). Berikut ini adalah tampilan permasalahan yang ditemukan pada proses unggah data pendukung.

Gambar 1.4 Contoh Format Data Pendukung

	A	B	C	D	E
2	Frekuensi		: 12		
3	Target		: 3		
4	URAIAN TUGAS		: Melakukan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran secara berkala		
5					
6		No	Tanggal	Keterangan	
7		1	3 Juli 2023	melakukan monitoring dan evaluasi sub kegiatan dan kegiatan	
8		2	3 Juli 2023	melakukan monitoring dan evaluasi tujuan sasaran, program	
9		3	4 Juli 2023	melakukan monitoring dan evaluasi anggaran	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Frekuensi 235 ▾ Frekuensi 287 ▾ Frekuensi 12/3/6/4/1 ▾ Frekuensi 52 ▾

Sumber : Dokumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan Gambar 1.4 Bagian Organisasi telah menetapkan format khusus yang harus digunakan oleh setiap OPD saat mengisi E-ABK 2024. Dengan adanya format ini, diharapkan proses pengisian menjadi lebih konsisten, sehingga Bagian Organisasi dapat lebih mudah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap data yang diinput.

Gambar 1.5 Halaman Uraian Tugas

Kecamatan Tegalsari								
<i>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>								
No	Nama Staf	Tugas dan Fungsi	Uraian Tugas Staf	Hasil Kerja Staf	Targ et	Frek	Vol	Data Penduk ung
111	Pengadm inistrasi Perkanto ran	Melaks anakan adminis trasi surat-menyr at	Mendis tribusik an Surat	Kegiata n	24	Tahun an (1)	24	

Sumber : Data diolah Peneliti, 2024

Gambar 1.5 menunjukkan tabel rincian uraian tugas pada jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari, dengan nama staf Pengadministrasi

Perkantoran. Tabel tersebut memuat informasi mengenai tugas dan fungsi Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan uraian tugas "Mendistribusikan Surat". Hasil kerja berupa kegiatan, target 24, dan frekuensi tahunan (1) serta dilengkapi bukti data pendukung.

Gambar 1.6 Data Pendukung pada Web E-ABK 2024

No.	Surat	Lampiran	Tanggal Surat	No. Surat	Pemula	Perihal	Penerima	Sifat	Acara	Kategori	Status	Aksi
1			2024-09-05 17:16:22	009 / 374/025.9.27/2024	DAHRYNO BOBI SANTOSO, ST (Seksi Pembangunan)	Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Dinas	Drs. KARTIKA INERAYANA	SUSA		PEMBERITAHUAN/ BIASA	Surat Telah Diproses	
2			2024-09-05 10:20:36	009 / 381/025.9.27/2024	ARI H RIZY SIRWINDI, SP (Sekretaris Daerah)	Pembuatan Pegangan Penghargaan	Drs. KARTIKA INERAYANA	SUSA		PEMBERITAHUAN/ BIASA	Surat Telah Diproses	
3			2024-09-05 09:53:30	409/075/025.9.27/2024	JUNDAI, SR (Basis Kepegawaian Indagator Pencatatan)	Pembuatan Pegangan Penghargaan	Drs. KARTIKA INERAYANA	SUSA		PENGANTARAN	Surat Telah Diproses	

Sumber : Data Pendukung pada Web E-ABK 2024

Setelah melakukan pengecekan pada data pendukung pada tombol biru, pada gambar 1.6 menampilkan aplikasi e-Surat yang berisi daftar surat keluar, dengan informasi seperti nomor surat, pengirim, tanggal, serta status surat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diunggah ternyata tidak sesuai format yang telah ditentukan oleh Bagian Organisasi. Perangkat daerah menggunakan format yang berbeda dan tidak menggambarkan capaian uraian tugas, target, maupun frekuensi. Sehingga Bagian Organisasi mengalami kesulitan dalam memahami target yang ingin dicapai terkait uraian tugas tersebut.

- Masalah ketiga, adanya pegawai pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran yang masih mengerjakan tugas di luar uraian jabatannya, namun belum dihitung beban kerjanya. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil observasi peneliti di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dengan uraian jabatan yang telah ditetapkan secara formal sehingga data yang dimasukkan mungkin tidak mencerminkan kondisi kerja yang sebenarnya. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: *"Sebenarnya untuk jabatan pengadministrasi perkantoran jumlah abknya tertulis di E-Docu tiga orang, padahal di lapangan cuma dua. Jadi satu orang itu sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan angka di aplikasi saja"*. (Hasil Wawancara, Maret 2025)

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Tegalsari yang terletak di Jl. Tanggulangin

No. 12, Keputran, Kec. Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60265. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian beserta staf jabatan Pengadministrasi Perkantoran dan Kepala Sub Bagian Kelembagaan beserta staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peneliti sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan gawai. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian mengetahui penelitian lebih lanjut, fokus penelitian ini mengacu pada teori efektivitas Duncan dalam buku yang berjudul “Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik” (Pardede, Yanty Siahaan, 2022, hal. 498). Terdapat 3 indikator mengenai ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan analisis mengenai penerapan aplikasi E-ABK 2024 menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Duncan yang meliputi 3 indikator. Berikut adalah analisis efektivitas penerapan aplikasi E-ABK 2024 pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan proses bertahap yang diperlukan untuk mencapai hasil akhir secara optimal. Dalam pelaksanaan suatu program, diperlukan tahapan yang terstruktur serta periode waktu yang sesuai agar setiap bagian dari tujuan dapat terpenuhi secara sistematis. Hal ini sejalan dengan pendapat (Dluha, 2022, hal. 5) bahwa keberhasilan program dapat diukur dari sejauh mana program tersebut mampu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun hasil penelitian terkait aspek pencapaian tujuan dalam Efektivitas Penerapan Aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menunjukkan bahwa bentuk pencapaian tujuan yang dilakukan antara pembuat kebijakan dalam hal ini Bagian Organisasi dan pelaksanaannya yaitu pegawai Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kurang berjalan optimal. Kerja sama antara kedua pihak telah mendukung kelancaran implementasi aplikasi sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, masih ada tantangan dalam aspek pelaksanaannya, terutama dalam hal ketepatan waktu. Berdasarkan penjelasan (Wahyudi, 2024, hal. 5040–5041) efektivitas penerapan E-ABK dapat dinilai melalui lima indikator utama, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam mengelola beban kerja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan aplikasi E-ABK 2024, masih ada tantangan untuk mencapai ketepatan waktu, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengawasan. Sumber kendala dari proses ini adalah kurangnya pemahaman teknis para Kepala Seksi dalam mengisi target data masing-masing pegawai. Kurangnya pemahaman tersebut berdampak pada ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data yang masuk, sehingga dapat menghambat kelancaran dan akurasi dalam pengelolaan informasi. Selain itu juga, durasi untuk melihat tingkat validasi data pendukung dalam pengisian E-ABK 2024 yang bervariasi menandakan bahwa sistem belum sepenuhnya efisien dan masih bergantung pada kapasitas internal masing-masing OPD. (Wilyanto, 2024, hal. 495–496) mengungkapkan bahwa kendala serupa terjadi karena komunikasi yang kurang efektif dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat dalam implementasi E-ABK. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan program terutama dalam aspek ketepatan waktu dan kualitas data yang diperlukan untuk evaluasi beban kerja secara akurat. Meskipun demikian, langkah yang diterapkan termasuk koordinasi langsung melalui komunikasi informal maupun rapat resmi. Sejalan dengan temuan (Wilyanto, 2024, hal. 497) peningkatan komunikasi dapat menjadi solusi untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas tetap terjaga. Langkah yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi langsung, baik melalui komunikasi informal maupun dalam rapat resmi. Kasubag Umpeg memiliki inisiatif untuk memanggil atau mengingatkan Kepala Seksi guna memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga kelancaran pelaksanaan tugas dapat terjaga. Keterlambatan dalam pengisian uraian tugas serta pengunggahan data pendukung mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih efektif, seperti peningkatan sosialisasi, pelatihan teknis setiap perangkat daerah memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Target yang diterima oleh para pelaksana yaitu pegawai Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga menunjukkan ketidaksesuaian dimana seharusnya dalam mengentry data Aplikasi Barang dan Kartu Stok 24 kegiatan dalam 1 tahun di aplikasi E-ABK 2024 menjadi 1 kegiatan saja dalam hitungan 1 tahun. Adanya kesalahan format yang ditentukan oleh Bagian Organisasi pada penguploadan data pendukung di aplikasi juga menjadi penyebab ketidaksesuaian target. Serta adanya pegawai pada jabatan Pengadministrasi Perkantoran yang masih mengerjakan tugas di luar uraian jabatannya. (Wilyanto, 2024, hal. 496) menekankan kendala teknis dalam implementasi E-ABK seringkali berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara beberapa pihak. Temuan ini sejalan dengan

kondisi yang terjadi, di mana format dan detail data yang menjadi acuan masih menjadi tantangan bagi pegawai, menyebabkan perbedaan pemahaman dalam pengisian data. Meskipun demikian, Kasubag Umpeg memiliki peran dalam melakukan review akhir guna memastikan bahwa data yang diunggah telah sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan. Selain itu juga, akurasi uraian tugas jabatan yang ada belum sepenuhnya menggambarkan tugas harian pegawai. Masalah yang kemungkinan muncul yaitu pegawai tersebut terlibat dalam tugas tidak resmi di bidang lain. Ketika pegawai merasa bahwa tugas yang mereka lakukan tidak sepenuhnya tercakup dalam uraian tugas resmi, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengambil inisiatif dan menyelesaikan pekerjaan yang dianggap penting, meskipun itu berada di luar tanggung jawab resmi mereka. Adapun perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami cara menginput uraian tugas berpotensi menghambat validasi data. Sebagaimana diungkapkan oleh (Wahyudi, 2024, hal. 10) yang menekankan perlunya sosialisasi lebih mendalam agar pegawai mampu memahami alur pengisian dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian untuk memastikan kualitas data yang lebih akurat. Bagian Organisasi dengan Tim analisis beban kerja telah melakukan pencocokan data dengan uraian tugas dan eksistensi pegawai secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan PD. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif agar proses pengisian data dapat dilakukan dengan lebih akurat dan sesuai standar. Selain itu juga menetapkan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab peran setiap pegawai. Hal ini dapat membantu mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa pegawai tidak merasa terpaksa untuk mengambil alih tugas di luar uraian jabatan mereka.

Pemahaman terhadap dasar hukum oleh pegawai yang masih diperlukan pembelajaran menunjukkan bahwa masih terdapat aspek-aspek teknis yang belum sepenuhnya dikuasai yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data dengan realitas. Sebagian besar staf belum memahami proses penyusunan Analisis Beban Kerja karena hanya beberapa orang yang mengerjakannya. Selain itu, adanya ketidakefektifan dalam proses penyebarluasan informasi yang juga menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara Bagian Organisasi dan Kecamatan Tegalsari. Menurut (Wahyudi, 2024, hal. 10) menunjukkan bahwa efektivitas penerapan E-ABK bergantung pada pemahaman pengguna terhadap aplikasi dan mekanisme kerja. Temuan ini relevan dengan kondisi Kecamatan Tegalsari, di mana pemahaman pegawai terhadap aplikasi masih belum merata. Sosialisasi yang diterima pegawai Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terkait E-ABK 2024 hanya berasal dari mahasiswa magang di Bagian Organisasi. Sedangkan, menurut Bagian Organisasi sosialisasi terkait dasar hukum telah dilakukan melalui zoom dan pendampingan perangkat daerah. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat (Wilyanto, 2024, hal. 495) menekankan bahwa minimnya komunikasi antara unit kerja merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan E-ABK di tingkat kecamatan. Sosialisasi yang dilakukan sebaiknya lebih intensif dan terstruktur,

sehingga pegawai tidak hanya mendapatkan informasi secara sepintas, tetapi juga memperoleh pendampingan dalam penerapan aplikasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan evaluasi terhadap metode sosialisasi yang telah digunakan, pembuatan panduan yang lebih sistematis, pelibatan lebih banyak pihak dalam proses sosialisasi, serta mekanisme umpan balik yang memungkinkan pegawai menyampaikan kesulitan mereka. Strategi lain dilakukan oleh Bagian Organisasi bagi perangkat daerah untuk memantau kepatuhan ketentuan pelaksanaan E-ABK 2024 sesuai dasar hukum yang menjadi acuan dengan melakukan desk.

2. Integrasi

Integrasi merupakan suatu pengukuran terhadap tingkat kemampuan sebuah organisasi dalam melaksanakan sosialisasi serta membangun komunikasi dengan berbagai organisasi lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Habibah, 2025, hal. 7) bahwa integrasi mencerminkan suatu aspek yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam menangani komunikasi yang melibatkan prosedur dan proses sosialisasi. Dengan adanya integrasi yang efektif, organisasi dapat meminimalkan kesenjangan informasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami dan melaksanakan perannya secara optimal.

Adapun hasil penelitian, prosedur pengisian aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menunjukkan bahwa bentuk integrasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan yaitu Bagian Organisasi dan pelaksanaannya yaitu pegawai Kecamatan Tegalsari pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami cara kerja aplikasi berisiko mengalami kesalahan atau kebingungan dalam proses pengisian. Pendekatan yang didasarkan pada indikator beban kerja dianggap lebih akurat dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, karena memperhitungkan beban kerja aktual dibandingkan dengan standar umum (Aytona et al., 2022, hal. 6). Namun, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada sejauh mana prosedur kerja telah diselaraskan dengan kebijakan yang berlaku. Tanpa koordinasi yang baik, pegawai akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan secara konsisten. Selain itu, kesulitan pengisian karena prosedur tersedia tahun 2023, tanpa adanya pembaruan atau penyesuaian yang relevan untuk pelaksanaan E-ABK 2024. Ketidakjelasan dalam panduan pengisian aplikasi E-ABK 2024 menyebabkan inkonsistensi data, khususnya pada uraian jabatan. Kendala yang sering menimbulkan kebingungan pegawai pada pengisian uraian jabatan, dikarenakan tiap seksi memiliki persepsi yang berbeda soal aktivitas kerjanya yang berpengaruh pada validitas analisis kebutuhan pegawai dan berdampak pada analisis beban kerja. (Chen et al., 2023, hal. 347) menyatakan bahwa beban kerja dan penghargaan non ekonomis memiliki peran dalam membentuk perilaku proaktif pegawai. Namun, efektivitas faktor-faktor tersebut dalam mendorong proaktivitas pegawai bergantung pada pemahaman yang memadai dan sosialisasi yang baik. Dalam penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman serta keterbatasan sosialisasi

menyebabkan pegawai kesulitan menjalankan tugas administratif secara efisien. Hal ini dapat menghambat integrasi program terutama dalam aspek prosedur pada pengisian E-ABK 2024. Meskipun demikian, Bagian Organisasi telah mengungkapkan bahwa prosedur cukup jelas bagi pegawai yang telah mengikuti proses ini sejak awal, namun pegawai baru hasil mutasi mengalami kesulitan akibat kurangnya pendampingan dan pelatihan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam pengisian aplikasi E-ABK 2024.

Sosialisasi yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan pegawai memahami dan menjalankan prosedur dengan benar. Soerjono dalam (Laduni & Wibawani, 2023, hal. 7) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses di mana individu diarahkan untuk mengenali, memahami, menaati, dan menjalani sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku. Sebagai pembuat aplikasi, Bagian Organisasi telah melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah, khususnya kepada pegawai pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. (Zulfa & Rosdiana, 2024, hal. 7) menekankan bahwa efektivitas sosialisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem digital seperti E-ABK, terutama dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap mekanisme pengisian data. Hasil penelitian menunjukkan, sosialisasi diberikan melalui berbagai metode, termasuk platform zoom dan petunjuk teknis, serta melibatkan penyelia untuk mendampingi perangkat daerah. Namun, meskipun sosialisasi telah dilakukan, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pemahaman yang mendalam terkait pengisian dalam aplikasi E-ABK 2024. Hal ini karena sosialisasi yang diberikan hanya bersifat umum, penjabaran teknisnya terkait tugas dan tanggung jawab pegawai, serta pengisian kebutuhan riil pegawai dan pemetaan beban kerja, menjadikan pegawai belum sepenuhnya menguasai cara pengisian data yang tepat. Kurangnya sosialisasi banyak pegawai yang merasa masih kesulitan dalam mengisi data secara tepat, karena materi sosialisasi lebih banyak memberikan pemahaman umum dan belum merinci langkah-langkah teknis yang diperlukan. Selain itu juga, komunikasi dari pegawai pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran dengan penyelia yang disediakan oleh Bagian Organisasi masih dinilai kurang. Akibatnya setiap pegawai melakukan pengisian dengan kemauannya sendiri, tanpa meminta arahan dengan penyelia. Hal ini dapat menghambat integrasi program terutama dalam aspek sosialisasi yang diperlukan strategi yang lebih sistematis dan terarah dalam menyampaikan materi sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, memastikan program berjalan selaras dengan kondisi lapangan, serta mempertahankan efektivitas dan ketahanan dalam menghadapi perubahan. Menurut (Shabrina et al., 2024, hal. 476) adaptasi ini bergantung pada sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan

pelayanan sesuai perencanaan. Dalam memberikan layanan berkualitas, keberadaan sarana dan prasarana menjadi faktor utama yang mendukung kelancaran proses adaptasi, karena fasilitas yang tersedia berperan dalam menciptakan kenyamanan bagi pengguna selama pelayanan berlangsung. Hal tersebut termasuk dalam faktor-faktor yang mendukung proses adaptasi, di mana sarana dan prasarana yang disediakan diharapkan dapat memberikan kenyamanan selama proses pelayanan berlangsung.

Adapun hasil penelitian terkait aspek adaptasi dalam Efektivitas Penerapan Aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menunjukkan bahwa bentuk adaptasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dalam hal ini Bagian Organisasi dan pelaksanaannya yaitu pegawai Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian cukup baik. Hal ini disebabkan karena ada beberapa fitur dalam aplikasi yang tidak sempat dibahas saat pelatihan, sehingga waktu pengisian pegawai Jabatan Pengadministrasi Perkantoran harus memahami dan mencari tahu sendiri. Kurangnya panduan teknis yang lengkap menyebabkan pegawai harus mencari solusi sendiri, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pengisian data. (Zulfa & Rosdiana, 2024, hal. 7) menekankan bahwa efektivitas sosialisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem digital seperti E-ABK, terutama dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap mekanisme pengisian data. Dalam menghadapi kendala tersebut, pegawai Jabatan Pengadministrasi Perkantoran mengatasinya dengan berkoordinasi langsung kepada penyelia aplikasi atau berdiskusi dengan rekan kerjanya. Upaya ini menunjukkan inisiatif individu dalam mencari solusi, tetapi juga mengungkap bahwa koordinasi terkadang berjalan lambat, terutama saat menghadapi kendala teknis yang membutuhkan penyelesaian segera. Menurut Duncan dalam (Harahap et al., 2021, hal. 84) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan organisasi tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Organisasi yang mampu beradaptasi secara cepat dan efektif akan berhasil menghadapi dinamika perubahan, sedangkan organisasi yang lambat atau gagal dalam melakukan penyesuaian akan mengalami dampak negatif akibat perubahan tersebut. Oleh karena itu, strategi jangka panjang yang perlu diterapkan adalah penyediaan materi pelatihan yang lebih lengkap dan terstruktur serta peningkatan kompetensi penyelia agar dapat menangani masalah teknis dengan cepat dan tepat. Bagian Organisasi mengakui bahwa program pelatihan atau bimbingan bagi pegawai dalam penggunaan aplikasi E-ABK 2024 masih kurang, pelatihan hanya pelatihan perhitungannya bukan pelatihan penggunaan aplikasinya. Diperlukan pelatihan teknis yang mencakup penggunaan aplikasi E-ABK 2024 secara langsung, agar pegawai memahami setiap fitur dan prosedur dengan jelas. Selain itu, bimbingan berkelanjutan dan dukungan teknis perlu disediakan untuk memastikan pegawai dapat mengoperasikan aplikasi dengan tepat tanpa kendala. Kondisi ini mengakibatkan banyak pegawai mengalami

kesulitan dalam merumuskan uraian tugas, menghitung beban kerja, dan mendeskripsikan kegiatan dalam bentuk narasi yang tepat. Selain itu, saat proses validasi data, ditemukan sejumlah data yang tidak mencerminkan kondisi kerja sebenarnya, sehingga proses verifikasi menjadi lebih sulit dan berdampak pada ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Selain peningkatan kemampuan, aspek penting lain dalam proses adaptasi terhadap aplikasi E-ABK 2024 adalah memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif, diperlukan fasilitas yang mendukung setiap tahapannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Moenir dalam (Dewanty & Nawangsari, 2024, hal. 641) bahwa sarana dan prasarana memiliki peran penting sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan kemampuan program untuk beradaptasi, sehingga ketersediaannya harus dipastikan agar setiap tahap pelaksanaan berjalan optimal. Tersediannya fasilitas yang memadai menjadi pondasi utama untuk memastikan bahwa proses administrasi dan penginputan data dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai standar yang ditentukan. Oleh karena itu, kelengkapan dan kesiapan sarana prasarana, seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta dukungan teknis lainnya sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan sistem aplikasi E-ABK 2024. Pegawai pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari, diketahui bahwa perangkat komputer dan koneksi internet yang stabil merupakan kebutuhan utama dalam mendukung penginputan data aplikasi E-ABK 2024. (Wilyanto, 2024, hal. 6) menekankan bahwa keberhasilan implementasi E-ABK tidak hanya terletak pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada sistem pemantauan berkala terhadap kondisi perangkat yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia saat ini telah memenuhi kebutuhan dasar, namun evaluasi secara rutin terhadap kondisi perangkat masih terbatas. Hal ini dibuktikan bahwa evaluasi hanya dilakukan ketika terjadi kendala teknis saja. Kecamatan Tegalsari menyebutkan bahwa Sekretaris Camat dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas memastikan kesiapan perangkat dan jaringan. Penanggung jawab ini merupakan langkah yang tepat agar pemeliharaan fasilitas berjalan dengan baik dan lebih terkoordinasi. Akan tetapi, efektivitas dari penanggung jawab ini tetap membutuhkan sistem pemantauan dan pelaporan yang terstruktur agar dapat menjamin keberlanjutan operasional aplikasi. Adapun strategi dalam meningkatkan ketersediaan fasilitas dilakukan melalui mekanisme pengajuan secara berjenjang kepada pimpinan. Pendekatan ini sesuai dengan prosedur penganggaran, tetapi harus diperkuat dengan pemetaan kebutuhan yang didasarkan pada data yang akurat dan terstruktur. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya juga turut berperan dalam memastikan sarana yang tersedia memadai. Melalui pembuatan petunjuk teknis dalam bentuk PDF, pendampingan langsung ke lapangan, serta dukungan akses informasi yang luas, Bagian Organisasi memberikan kontribusi penting dalam aspek pemahaman teknis dan aksesibilitas aplikasi. Adapun tanggung jawab utama terhadap kesiapan fasilitas aplikasi berada di Sub Bagian

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, meskipun tanggung jawab pengelolaan fasilitas secara umum tetap melekat pada setiap perangkat daerah. Hal ini menandakan perlunya koordinasi antar lembaga agar tugas dan wewenang tidak tumpang tindih, melainkan saling mendukung dalam satu ekosistem kerja yang harmonis. Adapun kendala dalam penyediaan fasilitas juga tidak ditemukan hambatan yang signifikan dari sisi aksesibilitas aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang dengan fleksibilitas tinggi melalui jaringan WiFi atau LAN yang dapat diakses dari berbagai Lokasi. Dengan dibukanya akses jaringan di berbagai titik, perangkat daerah tidak lagi bergantung pada lokasi fisik tertentu untuk menggunakan aplikasi, yang berarti efisiensi waktu dan mobilitas kerja dapat tercapai secara lebih maksimal.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, peneliti menggunakan teori Duncan sebagai dasar untuk mengukur efektivitas melalui 3 indikator, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Indikator Pencapaian Tujuan pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dinilai kurang optimal. Pada sub indikator kurun waktu, masih ditemukan keterlambatan tiap tahunnya akibat ketergantungan antar seksi dan perbedaan tingkat kesiapan data. Pada sub indikator sasaran, pelaksanaan pengisian aplikasi E-ABK 2024 telah diarahkan untuk mencerminkan beban kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Namun, masih terjadi ketidaksesuaian antara target dengan data pendukung akibat perbedaan pemahaman antar Kepala Seksi mengenai kegiatan yang relevan dengan jabatan dimaksud. Serta adanya pegawai yang masih mengerjakan tugas diluar jabatannya. Sementara dalam sub indikator dasar hukum, regulasi yang digunakan sebagai rujukan seperti Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 telah tersedia dan digunakan. Namun, pemahaman terhadap regulasi aplikasi belum merata.

2. Integrasi

Indikator integrasi pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya telah dilakukan, namun belum mencapai tingkat optimal. Pada sub indikator prosedur, kendala utama yang dihadapi adalah pemahaman pegawai terhadap prosedur pengisian yang masih mengacu pada panduan tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan kebingungan terutama bagi pegawai baru hasil mutasi. Selain itu, pada sub indikator sosialisasi

melalui zoom dan menyediakan petunjuk teknis dalam bentuk dokumen PDF, namun informasi yang disampaikan dinilai belum menyentuh aspek teknis secara mendalam.

3. Adaptasi

Indikator adaptasi yang mencakup peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana dapat diambil kesimpulan bahwa pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berlangsung dengan cukup baik. Pada sub indikator peningkatan kemampuan, adapun peran aktif penyelia tim analisis beban kerja dalam membantu pelaksana menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi selama proses pengisian. Meskipun pegawai masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur aplikasi, menyusun uraian tugas, serta memahami perhitungan beban kerja. Sementara dalam sub indikator sarana dan prasarana, dari ketersediaan sarpras seperti komputer dan jaringan internet pada jabatan Pengadministrasi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah memadai. Namun, evaluasi terhadap perangkat masih bersifat reaktif dan belum dilaksanakan secara berkala, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi penggunaan aplikasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai bahan masukan dan evaluasi mengenai Efektivitas Penerapan Aplikasi E-ABK 2024 pada Jabatan Pengadministrasi Perkantoran di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

a. Peningkatan Koordinasi antar Seksi secara Terjadwal

Disarankan untuk membuat agenda koordinasi rutin antar Kepala Seksi agar sinkronisasi waktu dan kesiapan data dapat dilakukan secara lebih terencana dan tidak menimbulkan keterlambatan pengisian aplikasi. Dengan ini, ketergantungan dapat diminimalisir dan distribusi tanggung jawab menjadi lebih merata.

b. Penyamaan Persepsi melalui Forum Diskusi Jabatan

Perlu diadakan forum diskusi teknis antar Kepala Seksi dan pejabat terkait untuk menyamakan pemahaman mengenai kegiatan apa saja yang relevan dengan tugas jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Ini penting agar target dan data pendukung sesuai dan tidak tumpang tindih. Supaya menghitung beban kerja yang pegawai mengerjakan tugas lain.

c. Pelatihan Internal terkait Regulasi Aplikasi

Meskipun regulasi seperti Permenpan RB No. 1 Tahun 2020 telah tersedia, disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan internal atau *refreshment* singkat mengenai penerapan regulasi tersebut dalam aplikasi, agar pemahaman antar pegawai menjadi lebih merata.

2. Integrasi

a. Pemutakhiran dan Penyebarluasan Panduan Prosedur Terbaru

Disarankan untuk memperbarui panduan pengisian aplikasi E-ABK sesuai dengan versi tahun berjalan dan penyebarluaskannya kepada seluruh pegawai, khususnya pegawai baru hasil mutasi. Hal ini penting agar tidak terjadi kekeliruan akibat penggunaan referensi tahun sebelumnya yang sudah tidak relevan.

b. Peningkatan Kualitas Materi Sosialisasi dengan Fokus Praktik Langsung

Sosialisasi sebaiknya ditingkatkan dengan menambahkan sesi praktik langsung atau simulasi pengisian aplikasi, agar peserta lebih memahami aspek teknis secara konkret, bukan hanya teori dalam dokumen atau paparan Zoom.

3. Adaptasi

a. Pelatihan Teknis dan Pendampingan secara Berkelanjutan

Disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan teknis secara rutin yang fokus pada praktik pengoperasian aplikasi, penyusunan uraian tugas, dan perhitungan beban kerja. Hal ini penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman teknis yang masih dihadapi oleh pelaksana.

b. Evaluasi Sarpras Secara Berkala

Disarankan agar dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana prasarana (komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya) secara terjadwal, bukan hanya saat terjadi gangguan. Hal ini untuk mencegah hambatan teknis yang bisa mengganggu kelancaran penggunaan aplikasi.

Referensi

- Aytuna, M. G., Politico, M. R., McManus, L., Ronquillo, K., & Okech, M. (2022). Determining staffing standards for primary care services using workload indicators of staffing needs in the Philippines. *Human Resources for Health*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00670-4>
- Buchari, D. H. A. (2021). *Modul analisis beban kerja*. KEMENTERIAN AGAMA BADAN LITBANG DAN DIKLAT PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI.
- Chen, L., Hu, X., & Liu, B. (2023). Fueling the Taking Charge Behaviors of Civil Servants: the Different Roles of Workload and Non-Economic Reward. *Journal of Chinese Political Science*, 28(3), 345–373. <https://doi.org/10.1007/s11366-023-09852-4>
- Dewanty, A. P., & Nawangsari, E. R. (2024). Efektivitas Program Taman Bacaan Masyarakat dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Perkotaan di RW 5 Kelurahan Jambangan, Surabaya. *NeoRespublica: Jurnal ...*, 5(2), 635–645. <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/182%0Ahttps://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/182/95>

- Didik Haryanto. (2021). Pengaruh Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. *Kindai*, 17(3), 325–346. <https://doi.org/10.35972/kindai.v3i17.618>
- Dluha, M. (2022). EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT MISKIN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Habibah, U. L. (2025). *Efektivitas Program Aplikasi Palapa Mojo dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Mojokerto*. 5, 5037–5046.
- Harahap, D. R., Badaruddin, B., & Harahap, R. H. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Perspektif*, 10(1), 76–87. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4073>
- Kemdikbud. (2024). *Kampus Merdeka*. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/
- Laduni, R. R. I., & Wibawani, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Di Kelurahan Wonokromo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 149–157. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4305>
- PANRB. (2020). *Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja* (hal. 1–46).
- Pardede, Yanty Siahaan, P. D. K. (2022). *Transformasi Pembangunan Melalui Pelayanan Publik*.
- Shabrina, M. A., Hertati, D., Kunci Efektivitas, K., Dugaan, P., & Ham, P. (2024). *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Efektivitas Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat*. 5(2), 469–479.
- Wahyudi, N. &. (2024). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 6, 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i11.3511>
- Wilyanto, M. &. (2024). *MES Management Journal*. 3, 488–500.
- Zulfa, P. S., & Rosdiana, W. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi ABK 2023 pada Jabatan Pengelola Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Effectiveness of Monitoring and Evaluation Implementation of ABK 2023 Application in Public Complai*. 3, 1–11.

